

Nilai-Nilai Toleransi Beragama dalam Film Dokumenter
Studi Deskriptif Kualitatif atas Film *Indonesia Bukan Negara Islam*
dengan Pendekatan Semiotika Charles Sanders Pierce

Alfonsus Condro Herbayu/ Bonaventura Satya Bharata SIP M.Si

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Jalan Babarsari No.6 Yogyakarta 55281

Abstrak:

Penelitian ini termasuk studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika. Metode semiotika, yaitu suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Data dalam penelitian ini didapat melalui pemilihan *frame-frame* pada beberapa fragmen di dalam film yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni nilai-nilai toleransi beragama. Dari data yang diperoleh penulis melakukan analisis dengan menggunakan tanda-tanda yang terdapat dalam film dengan teori semiotika Charles Sanders Pierce. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu signifikasi gambar/ *frame* yang kemudian hasilnya akan dijadikan bahan untuk analisis tahap berikutnya yakni interpretasi secara kontekstual.

Hasil yang diperoleh dari analisis atas film *Indonesia Bukan Negara Islam* adalah makna tanda yang terdapat dalam lima *frame* terpilih yang berbicara soal toleransi beragama. Konstruksi yang sarat akan makna itu muncul dalam bentuk gambar cuplikan adegan dan juga narasi narasumber yang dianggap mewakili maksud dari sang sutradara, Jason Iskandar. Sikap toleran yang muncul dalam film ini antara lain : Pengakuan akan hak personal masing-masing manusia sebagai dasar memahami perbedaan lintas budaya, agama, kepercayaan dan sosial kemasyarakatan, Konsep kemasyarakatan berbasis "*Agree In Disagreement*". Adanya jaminan aman, damai, rukun, dan tenteram sebagai landasan menjalankan nilai-nilai falsafah Pancasila.

Kata Kunci: Toleransi, Agama, Semiotika, Film *Indonesia Bukan Negara Islam*

A. Latar Belakang

Dapat dikatakan dunia perfilman saat ini telah mampu menyedot perhatian masyarakat. Selain itu film menjadi salah satu pemicu munculnya opini diantara banyaknya opini dalam ruang publik (Effendy, 2005: 10). Sebagai salah satu bentuk media massa, film juga punya efek atau pengaruh bagi pikiran, pendapat, sikap dan tindakan penonton meskipun efek tersebut cenderung lebih eksklusif ketimbang media massa konvensional. Oleh karena itu film adalah medium (*channel*) komunikasi yang ampuh, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan pendidikan (edukatif) secara penuh (Effendy, 2003: 207).

Film dokumenter sendiri berbeda dengan film fiksi atau drama. Film bergenis dokumenter selalu berusaha menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun tetap harus diakui, film dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu (Effendy, 2005: 12). Intinya film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal yang senyata mungkin.

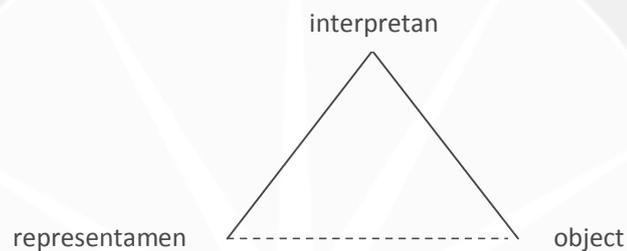
Saat ini film dokumenter telah menjadi tren tersendiri di dunia perfilman. Para pembuat dokumenter pun banyak melakukan eksperimen sehingga muncul sajian dokumenter yang beragam, unik dan tak lazim. Salah satu film dokumenter yang unik yaitu film *Indonesia Bukan Negara Islam*. Film yang telah berkelana hingga Laos ini diisi oleh dua narator beragama Islam yang menuntut ilmu di sekolah Katolik selama bertahun-tahun. Menjadi menarik karena kedua narator tersebut

adalah minoritas saat mereka berada di lingkungan sekolah namun saat menjejakkan kaki keluar dari gerbang sekolah, seketika itu pula mereka menjadi kaum mayoritas. Kedua narator tersebut lalu menceritakan kisah mereka di sekolah Katolik tadi. Mereka juga bertutur akan pendapat mereka mengenai Islam dan Negara Islam itu sendiri. Film yang berdurasi 9 menit 33 detik ini juga memperlihatkan realita dimana Indonesia seolah-olah “dikuasai” oleh satu arus utama sebuah agama. Lewat penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Tugu Monas Jakarta 2008 silam, pembuat film merangkai isu besar ini melalui film dokumenternya. Judul film ini sendiri, lanjutnya, terinspirasi oleh poster seorang demonstran yang tergeletak di plataran Monas (Gambar Darurat, 2009). Film ini unik karena selain isu yang diangkat cukup “berani” cara penyajian visualnya pun tak lazim. Film ini berisi potongan – potongan foto dalam *monochrome* yang disusun dan diiringi pendapat-pendapat dari narasumber sehingga menjadi suatu cerita (*stop motion*).

Peneliti tertarik untuk meneliti film ini karena film ini menyuguhkan pernyataan yang cukup “berani” dan relevan dengan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Film ini menyodorkan konsep tentang toleransi antar umat beragama secara ringan dan sedarhana. Disamping itu, film ini juga punya daya tarik di ranah gaya bercerita dan visualnya. Banyak simbol-simbol yang mempunyai pesan tersirat dan tersurat dalam film. Semiotika dipilih karena kajian ini dinilai mampu member ruang bagi peneliti untuk membongkar “pesan tersembunyi” dalam film (Irawanto, 1999:vii). Penelitian ini menggunakan teori semiotika

Charles Sanders Pierce sebagai metode analisis. Semiotika ala Pierce diharapkan dapat membongkar makna yang terkandung dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam* terlebih makna yang terkait dengan nilai-nilai toleransi beragama secara komprehensif sekaligus mendetail.

Analisa dilakukan dengan bantuan teori segitiga makna atau *triangle meaning* milik Pierce yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni tanda (sign/representamen), object, dan interpretant (Budiman, 2004: 26).



Proses pemaknaan tanda pada Pierce mengikuti hubungan yang berproses antara tiga titik, yaitu tanda/representamen, objek dan interpretan. Representamen adalah bagian tanda yang dapat dipersepsi (secara fisik atau konseptual) yang merujuk pada suatu yang diwakili olehnya. Kemudian interpretan adalah bagian dari proses yang menafsirkan hubungan antara representemen dengan obyek. Oleh karena itu, bagi pierce tanda tidak hanya representatif namun juga interpretatif.

Dalam proses interpretasi, Pierce membedakan tiga jenis tanda yang mungkin ada. (1) Hubungan antara tanda dan acuannya dapat berupa hubungan kemiripan; tanda itu disebut **ikon**. (2) Hubungan ini dapat timbul karena ada

kedekatan eksistensi; tanda itu disebut **indeks**. (3) akhirnya hubungan itu dapat pula merupakan hubungan yang sudah terbentuk secara konvensional; tanda itu adalah **simbol** (Zoest, 1992: 8-9). Sedangkan acuan bagi tanda ini disebut obyek. Obyek merupakan konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Interpretasi atau penggunaan tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang obyek yang dirujuk oleh sebuah tanda. Hal yang terpenting dalam proses *semiosis* adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda tersebut digunakan dalam proses berkomunikasi.

Penelitian secara sengaja memilih pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce karena teori Peirce merupakan *grand theory* dalam semiotika. Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan kemudian menggabungkan kembali semua komponen dalam struktur tunggal (Sobur, 2006 : 97). Semiotika Peirce dengan konsep ikon, indeks dan simbolnya diharapkan mampu memberikan perspektif secara mendetail dan aplikatif dengan obyek penelitian yakni film.

B. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana nilai-nilai toleransi beragama direpresentasikan dalam Film Dokumenter “Indonesia Bukan Negara Islam”.

C. Hasil dan Analisis Data

C.1 Analisis Semiotik Film *Indonesia Bukan Negara Islam*

Peneliti menemukan nilai-nilai toleransi beragama dalam lima *frame* yang masing-masing mewakili adegan-adegan penting film *Indonesia Bukan Negara Islam*. Sutradara menggambarkan semangat toleransi di awal film dari cakupan kecil terlebih dahulu yakni lingkungan sekolah yang digambarkan dalam **adegan 1A**.

Gambar 1.



Adegan di atas memperlihatkan salah satu kegiatan rohani yang diadakan di sekolah Katolik yakni Ekaristi. Dari adegan tersebut didapatkan makna bahwa toleransi terhadap sesama merupakan perwujudan ajaran kasih yang dijalankan Gereja Katolik. Semangat kasih dalam ibadat Ekaristi bukan hanya soal perayaan liturgis dan formalitas namun mewujud dalam toleransi kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Setidaknya itulah yang diakui Galih dan Bambang, dua siswa muslim yang sudah belasan tahun sekolah di sekolah Katolik.

Sebagai muslim, Galih dan Bambang dianjurkan untuk tekun mendirikan shalat lima waktu. Dengan mendirikan shalat, setiap umat Islam diingatkan untuk

selalu ingat akan Tuhan dan bersikap rendah hati. Itulah makna yang dapat diambil dari **adegan 1B**.

Gambar 2.



Meski berada di lingkungan sekolah yang notabene Katolik, Galih dan Bambang tetap mendirikan shalat. Di sisi lain, pihak sekolah juga memberi kesempatan siswanya yang beragama non Katolik untuk melaksanakan kewajiban agama mereka. Toleransi yang berakar pada ajaran kasih barangkali menjadi alasan. Namun patung salib Yesus dan Bunda Maria yang terpajang di ruang tempat Galih dan Bambang mendirikan shalat dapat menjadi representasi hadirnya toleransi.

Toleransi beragama memang kental terasa di lingkungan sekolah. Namun saat melihat dalam cakupan yang lebih luas, banyak tindakan intoleran yang terjadi di tengah masyarakat. Peristiwa penyerangan kelompok yang bertarikut FPI terhadap kelompok AKKBB yang terjadi di silang Monas, 1 Juni 2008 menjadi salah satu contoh nyata. Peristiwa ini dihadirkan dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam* dalam **adegan 2A**.

Gambar 3.



Namun Galih dan Bambang sebagai sesama umat Islam sangat tidak setuju dengan tindakan anarkis dari kelompok yang bergerak atas nama Islam. Bagi Galih dan Bambang agama adalah perkara personal, diluar itu kita hanya perlu memahami dan menghormati hak personal masing-masing orang.

Selain lewat ibadah shalat, Islam Indonesia juga menunjukkan nilai-nilai toleransi lewat bangunan masjid. Hal ini ditunjukkan lewat bentuk masjid yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan bentuk bangunan masjid, salah satunya disebabkan karena adanya inkulturasi. Masjid beratap tumpang dan berundak seperti yang digambarkan dalam **adegan 3A** dimaknai sebagai keterbukaan Islam menerima budaya Jawa dan Hindu yang telah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia.

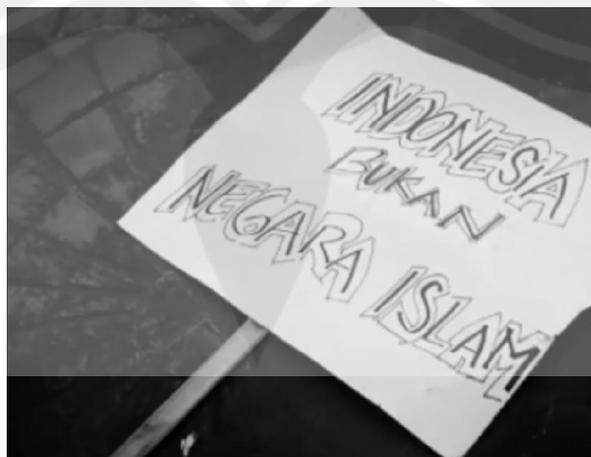
Gambar 4.



Bangunan masjid yang selalu cenderung lebar dan tinggi merupakan representasi dari agama Islam sebagai agama yang proporsional secara vertikal dan horizontal. Vertikal yang dimaksud adalah hakekat iman dan takwa yang hanya semata-mata tertuju pada Tuhan yang mewujudkan secara horizontal dimana umat Islam dituntut untuk melaksanakan ajaran Islam di tengah masyarakat dengan menegakkan persamaan, persatuan dan kedamaian.

Pada akhirnya film *Indonesia Bukan Negara Islam* menyebut sebuah kesimpulan lewat **adegan 3B** yang menggambarkan sebuah poster yang berisi tulisan “Indonesia Bukan Negara Islam”.

Gambar 5.



Poster tersebut milik kelompok AKKBB yang tergeletak setelah aksi penyerangan FPI terjadi. Poster merupakan media propaganda. Lewat poster, para demonstran AKKBB mengkomunikasikan ketidaksetujuan mereka terhadap konsep Negara Islam yang perlahan mulai mewujud dalam realitas masyarakat Indonesia. Dengan poster “Indonesia Bukan Negara Islam”, sutradara mengajak penonton untuk kembali menyadari bahwa Indonesia adalah Negara Pancasila, bukan Negara Islam. Negara Pancasila berarti negara yang menjunjung tinggi perbedaan dan keberagaman, tidak dimonopoli oleh satu hukum agama tertentu meski agama tersebut terhitung mayoritas. Inilah *director statement* dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam*.

C.2 Kontekstualisasi Hasil Analisis

Berbekal hasil interpretasi diatas, peneliti kemudian melakukan pemaknaan yang lebih dalam yaitu dengan mengkaitkan hasil pemaknaan secara kontekstual dengan beragam isu yang terjadi saat film ini diproduksi. Hasil pemaknaan yang pertama adalah film *Indonesia Bukan Negara Islam* hadir sebagai antitesis atas isu tentang adanya gelagat intoleran di lingkungan sekolah. Salah satu isu yang terjadi kala itu adalah keluarnya beberapa peraturan daerah yang mengarah pada gelagat yang intoleran. Salah satunya yaitu mewajibkan jilbab sebagai bagian dari seragam sekolah bagi yang beragama Islam, sedangkan yang non Islam diharapkan untuk menyesuaikan. Isu ini diangkat menjadi topik di media massa salah satunya di Majalah Tempo edisi 14 – 20 April 2008 dengan judul “Jilbab, Wajib dan Menyesuaikan”(Tempo Edisi 08/XXXVII/14, 2008:).

Lalu hasil pemaknaan yang kedua adalah pada gilirannya film *Indonesia Bukan Negara Islam* juga hadir sebagai respon atas fatwa MUI dan Surat Keputusan Bersama 2008 yang mendeskritkan kelompok Ahmadiyah.

Berawal pada 16 April 2008, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), yang berada dibawah naungan Kejaksaan Agung, mengusulkan pelarangan oragnisasi Ahmadiyah (HRW,2013: 36). Namun para pemuka muslim moderat merespon usulan tersebut dengan melakukan aksi dukungan terhadap Ahmadiyah dan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Hal serupa juga dilakukan kalangan moderat seperti Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mengadakan akpel akbar di pelataran Monas Jakarta pada 1 Juni 2008, dengan harapan bisa menekan pemerintah untuk tidak melarang Ahamdiyah. Namun militan Muslim yang bertaribut FPI dan LPI memprotes aksi damai itu, mengejar, memukul para peserta aksi dengan bambu dan kayu rotan, seperti yang diperlihatkan dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam* di salah satu fragmennya.

Pada 9 Juni 2008, Menteri Agama Basyuni, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Jaksa Agung Supanji menandatangani SKB yang memerintahkan Ahmadiyah untuk “menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok jaran Agama Islam,” termasuk juga adanya “penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.” Pelanggaran atas SKB ini dapat diancam limatahun penjara. Pada gilirannya, SKB inilah yang menjadi pintu gerbang lahirnya

berbagai peraturan daerah yang membekukan kegiatan Ahmadiyah dan mengundang pandangan negatif terhadap komunitas Ahmadiyah. Para pejabat Indonesia membenarkan SKB itu dengan dalih membantu mencegah tindak kekerasan anti-Ahmadiyah lebih lanjut. Namun menurut data yang dirangkun oleh Setara Institute, pada kenyataanya, kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah malah meningkat tajam pasca dikeluarkannya SKB 2008. Menurut Setara Institute, kekerasan naik dari tiga laporan insiden pada 2006 menjadi 50 pada 2010 dan 114 pada 2011 (setarainstitute.org diakses pada 24 September 2013).

Lewat film ini sutradara ingin bicara bahwa penolakan dan pembatasan kaum Ahmadiyah bisa menjadi preseden buruk bagi kelompok minoritas lain. Menjadi sangat mengkhawatirkan karena pemerintah dalam konteks kala itu justru membuat kebijakan yang tidak tolerir. Kebijakan itu seolah menjadi “senjata” bagi kaum-kaum miltan Islam untuk berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok Ahmadiyah. Masalahnyanya, saat kesewenang-wenangan itu terjadi, negara justru terkesan minim kendali. Negara seolah-olah “dikuasai” oleh satu arus utama sebuah agama. Inilah kekhawatiran sang sutradara yang kemudian disampaikan lewat medium film.

Selain Ahmadiyah, pelanggaran terhadap minoritas juga terjadi pada kaum Syiah di Jawa Timur. Gangguan terhadap sekolah YAPI dapat dilacak pada 2007. Pada November 2007, kepala Yayasan al-Bayyinah Sunni di Surabaya, Thohir al Kaff, berkhotbah di Bangil dengan menyerukan kepada umat agar “membersihkan” Bangil dari penganut Syiah. Sesudah khotbah, sekelompok orang orang menyerang sekolah YAPI, melempari batu, berteriak dan menendang

pintu (HRW,2013: 59). Menurut laporan polisi, pada 19 Desember 2010, tiga peluru memecahkan jendela asrama putri YAPI. Pihak sekolah yakin bahwa itu serangan anti Syiah. Dalam bahasa Arab, Syiah kependekan dari frase *Shiatu Ali* atau “para pengikut Ali” yang merujuk pada Ali ibn Abi Talib, menantu Nabi Muhammad. Umat Sunni menganggap Ali adalah khilafah dan terakhir dari empat khilafah. Kaum Syiah memandang Ali sebagai *Imam* pertama dan mendapak dia beserta keturunannya sebagai pengganti sah Muhammad. Perbedaan pandangan inilah yang memicu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 1984 yang menyatakan Muslim Indonesia yang kebanyakan menganut aliran Sunni untuk mewaspadaai ajaran Syiah (HRW, 2013:20). Diskriminasi agama dan keyakinan juga terjadi di ranah birokrasi, salah satunya dalam hal pembangunan tempat ibadah. *Human Right Watch* mendokumentasikan beberapa kasus dimana kelompok militan Islam memakai landasan SKB (surat keputusan bersama) 2006 tentang pendirian rumah ibadah, untuk menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah baru (HRW, 2013: 50).

Pada akhirnya, ketidaksetujuan terhadap wacana negara Islam bagi Indonesia muncul sebagai penekanan final dalam film ini. Meminjam pendapat yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid bahwa negara Islam itu adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara adalah salah satu kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Pernyataan senada nampaknya dikemukakan oleh sang sutradara dalam bentuk

gambar, narasi, dan susunan cerita di sebuah film pendek: *Indonesia Bukan Negara Islam*.

D. KESIMPULAN

Topik penelitian ini adalah nilai-nilai toleransi beragama yang terepresentasi dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam*, maka daripada itu shot adegan atau *frame* yang dianalisis lebih difokuskan pada *frame* yang diinterpretasikan oleh peneliti mengandung makna yang terkait dengan konsep dan nilai-nilai toleransi beragama. Kumpulan data primer berupa *frame-frame* tersebut kemudian dianalisis dengan dasar semiotika Charles Sanders Peirce.

Film *Indonesia Bukan negara Islam* pada dasarnya adalah film dokumenter yang berisi *slideshow* foto dalam *monochrome* diiringi musik dan narasi dengan gaya tutur sehari-hari. Dalam gaya tutur semacam ini, penonton akan lebih mudah mengerti dan memahami gambaran tentang apa maksud dari film *Indonesia Bukan Negara Islam* secara komprehensif.

Berbekal hasil interpretasi yang ada, peneliti kemudian melakukan pemaknaan kontekstual yaitu dengan mengkaitkan hasil pemaknaan secara kontekstual dengan beragam isu yang terjadi saat film ini diproduksi. Hasil pemaknaan yang pertama adalah film *Indonesia Bukan Negara Islam* hadir sebagai antitesis atas isu tentang adanya gelagat intoleran di lingkungan sekolah. Salah satu isu yang terjadi kala itu adalah keluarnya beberapa peraturan daerah yang mengarah pada gelagat yang intoleran. Salah satunya yaitu mewajibkan jilbab sebagai bagian dari seragam sekolah bagi yang beragama Islam, sedangkan

yang non Islam diharapkan untuk menyesuaikan. Lalu hasil pemkanaan yang kedua adalah pada gilirannya film *Indonesia Bukan Negara Islam* juga hadir sebagai respon atas fatwa MUI dan Surat Keputusan Bersama 2008 yang mendeskritkan kelompok Ahmadiyah. Lewat film ini sutradara ingin bicara bahwa penolakan dan pembatasan kaum Ahmadiyah bisa menjadi preseden buruk bagi kelompok minoritas lain. Menjadi sangat mengkhawatirkan karena pemerintah dalam konteks kala itu justru membuat kebijakan yang tidak tolerir. Kebijakan itu seolah menjadi “senjata” bagi kaum-kaum miltan Islam untuk berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok Ahmadiyah. Masalahnyanya, saat kesewenang-wenangan itu terjadi, negara justru terkesan minim kendali. Negara seolah-olah “dikuasai” oleh satu arus utama sebuah agama. Inilah kekhawatiran sang sutradara yang kemudian disampaikan lewat medium film.

Pada akhirnya, ketidaksetujuan terhadap wacana negara Islam bagi Indonesia muncul sebagai penekanan final dalam film ini. Meminjam pendapat yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid bahwa negara Islam itu adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara adalah salah satu kehiupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Pernyataan senada nampaknya dikemukakan oleh sang sutradara dalam bentuk gambar, narasi, dan susunan cerita di sebuah film pendek: *Indonesia Bukan Negara Islam*.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Kris. *Semiotika Visual*. 2004. Yogyakarta: Buku Baik.

Effendy, Heru. *Mari Membuat Film. Panduan Menjadi Produser*. 2005. Yogyakarta: Panduan.

Irawanto, Budi. *Film, Ideologi, dan Militer. Hegemoni Militer Dalam Sinema Indonesia*. 1999. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sobur, Alex. *Analisis Teks Media. Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. 2006. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zoest, AArt Van & Panuti Sudjiman. *Serba Serbi Semiotika*. 1991. Jakarta: Gramedia.

Laporan :

Deskripsi kekerasan atas nama agama pasca reformasi :
Human Right Watch, *In The Name Of Religion*. 2013.

Majalah :

Tempo Edisi 08/XXXVII/14, 2008.

Gatra Edisi 40-41/XIX/, 2013.

Sumber Internet :

Film “Indonesia Bukan Negara Islam” :
<http://www.youtube.com/watch?v=jssm9TbGnu4>
(diakses pada 11 Mei 2013)

Deskripsi kekerasan atas nama agama pasca reformasi :
<http://www.setara.institute.org/en/category/galleries/indicators>
(diakses 15 Juni 2013)

Laporan kekerasan terhadap Ahmadiyah :
<http://www.setarainstitute.org/en/category/galleries/indicators>
(diakses 24 September 2013).

